

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI I DPR RI  
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI,  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL  
INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI,  
LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

---

Tahun Sidang : 2010-2011  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri  
Rapat ke :  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 20 Juni 2011  
Pukul : 10.00 WIB  
Pimpinan Rapat : Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si.  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Penjelasan Menteri Luar Negeri RI mengenai Perlindungan  
TKI di Luar Negeri  
Hadir Anggota : ... orang dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI  
Pemerintah : Menteri Luar Negeri beserta jajaran

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI menyatakan keprihatinan yang mendalam atas eksekusi mati terhadap Ruyati binti Satubi, TKI di Arab Saudi. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI mengecam proses pelaksanaan keputusan hukuman mati yang dilakukan secara tertutup tanpa memperhatikan

kebiasaan dan hukum internasional tentang praktek perlindungan kekonsuleran, serta minta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas, serta menyampaikan nota protes kepada pemerintah Arab Saudi akan hal tersebut.

2. Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk meningkatkan upaya perlindungan WNI, khususnya yang terancam hukuman mati, dan menempuh langkah-langkah untuk meningkatkan posisi tawar RI bagi perlindungan WNI, serta melakukan langkah-langkah menggalang kepedulian masyarakat internasional terhadap Pemerintah Arab Saudi agar mematuhi norma-norma hukum dan kebiasaan internasional, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
3. Komisi I DPR RI mendesak Kemlu untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap perwakilan RI di Arab Saudi terkait dengan upaya perlindungan WNI di Arab Saudi.
4. Terkait kasus Darsem binti Daud, Komisi I DPR RI menyetujui usulan Kemlu untuk segera membayar “diyat” sebesar ±RP.4,7 milyar. Lebih lanjut, Komisi I DPR RI minta agar Pemerintah melalui perwakilan RI dapat memfasilitasi keluarga Alm. Ruyati binti Satubi untuk dapat mengunjungi makam Alm. Ruyati binti Satubi, dan agar seluruh hak-haknya selama bekerja segera diberikan.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB

Jakarta, 20 Juni 2011

**KETUA RAPAT,**

ttd

**DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.**

**A-73**